

PERAN PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN  
MASYARAKAT – MANDIRI PEDESAAN (PNPM-MP) DALAM  
EKONOMI RUMAH TANGGA

(Suatu Kajian Pada Kelompok SPP Harapan Bersama Kampung Koto Pulai  
Nagari Talang Koto Pulai Tapan Kecamatan Basa Ampek Balai  
Kabupaten Pesisir Selatan)

OLEH

EPIRAWATI  
05115020



FAKULTAS PERTANIAN  
UNIVERSITAS ANDALAS  
PADANG  
2010

**PERAN PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT –  
MANDIRI PEDESAAN (PNPM-MP) DALAM EKONOMI  
RUMAH TANGGA**

**(Suatu Kajian Pada Kelompok SPP Harapan Bersama Kampung Koto  
Pulai Nagari Talang Koto Pulai Tapan Kecamatan Basa Ampek Balai  
Kabupaten Pesisir Selatan)**

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan menganalisis profil pelaksanaan kegiatan SPP di kelompok SPP Harapan Bersama Nagari Talang Koto Pulai Tapan, menganalisis pemanfaatan dan pengembalian dana bantuan PNPM-MP oleh anggota kelompok SPP Harapan Bersama dan mengetahui peran PNPM-MP dalam meningkatkan ekonomi rumah tangga pada kelompok SPP Harapan Bersama. Penelitian dilaksanakan di Kampung Koto Pulai Nagari Talang Koto Pulai Tapan Kecamatan Basa Ampek Balai Kabupaten Pesisir Selatan.

Penelitian ini telah dilaksanakan pada bulan Juni sampai dengan Juli 2010. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode studi kasus. Responden dalam penelitian ini adalah anggota kelompok SPP Harapan Bersama yang berjumlah 10 orang dimana seluruhnya memanfaatkan dana PNPM-MP. Data dianalisa secara deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada profil pelaksanaan kegiatan SPP di kelompok SPP Harapan Bersama di Nagari Talang Koto Pulai Tapan yaitu identifikasi calon anggota, proses pencairan dana, proses penyaluran dana sudah dilaksanakan kelompok SPP Harapan Bersama sesuai dengan mekanisme dan Juknis PNPM-MP berjalan lancar dan baik sedangkan kegiatan sosialisasi dilapangan tidak berjalan sesuai dengan Juknis yang ada karena proses kegiatan sosialisasi dilapangan hanya dilakukan oleh tim teknis dan UPK Kecamatan tanpa adanya sosialisasi dari Kabupaten. Dalam pemanfaatan dan pengembalian dana PNPM-MP digunakan oleh kelompok SPP Harapan Bersama dalam penggunaan dana, jumlah dana yang dipinjam, jangka waktu pinjaman, pengawasan, cara pengembalian, waktu pengembalian, bunga pinjaman, dan jumlah pengembalian dana sesuai dengan Juknis PNPM-MP dan prosedur yang ada. Peran PNPM-MP dalam meningkatkan ekonomi rumah tangga pada kelompok SPP Harapan Bersama adalah mampu mengerakkan ekonomi rumah tangga anggota kelompok SPP Harapan Bersama. Ini dibuktikan dengan termotivasinya anggota kelompok, meningkatkan penghasilan anggota kelompok dan membuka lapangan kerja.

Diharapkan kepada tim teknis Kabupaten untuk ikut dalam sosialisasi program PNPM-MP di Kecamatan dan PNPM-MP dapat meningkatkan kegiatan pengadaan pelatihan dan pembinaan pada kelompok SPP melalui kerja sama dengan koordinasi pihak yang terkait dan anggota kelompok lebih aktif lagi dalam mewujudkan kelompok yang dinamis agar efisien teknis dapat tercapai.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Kemiskinan merupakan masalah yang paling mendasar dalam berbagai aspek kehidupan yang saling terkait, yang hampir dihadapi oleh negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. Kemiskinan telah menjadi masalah yang multidimensi dan hampir semua aspek kehidupan baik aspek ekonomi, sosial politik maupun sosial kemasyarakatan. Oleh karena itu, kemiskinan dapat berdampak negatif pada beberapa aspek seperti aspek sosial ekonomi yang dapat menjadi beban masyarakat, rendahnya partisipatif atau aktif masyarakat, menurunnya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, serta menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap birokrasi (Bappenas, 2004).

Masalah kemiskinan suatu bangsa secara umum ditandai dengan masih banyaknya penduduk dibawah garis kemiskinan. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukan bahwa pada tahun 2006 penduduk miskin di Indonesia berjumlah 39,03 juta jiwa atau 17,75 persen dari jumlah keseluruhan penduduk Indonesia. Penduduk miskin ini telah menjadi perhatian Pemerintah dan penanggulangan kemiskinan dijadikan sebagai prioritas utamanya. Oleh karena itu, masyarakat yang hidup dibawah garis kemiskinan perlu diberdayakan dan diberi kekuatan agar dapat menjalani hidup serta bebas dari jeratan kemiskinan.

Ketidakberdayan masyarakat tersebut tidak hanya disebabkan oleh masyarakat itu sendiri tetapi karena tidak adanya kesempatan yang diberikan oleh Pemerintah selaku pengambil kebijakan. Pemberdayaan masyarakat menekankan pada proses memberikan atau mengalihkan sebagai kekuasaan kekuatan atau kemampuan kepada masyarakat agar individu menjadi lebih berdaya, disamping itu pemberdayaan menekankan pada proses stimulasi, mendorong atau memberi motivasi individu agar mempunyai kemampuan pemberdayaan untuk menentukan apa yang menjadi pilihan hidupnya (Prijono dan Pranarka *cit* Alfisyahrin, 2002).

Hal yang perlu dilakukan untuk mengatasi masalah kemiskinan dibutuhkan suatu strategi berupa program pemberdayaan yang berbasis masyarakat yang bertujuan untuk memberantas kemiskinan. Salah satu program pembangunan masyarakat yang berbasis pemberdayaan sekarang adalah Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat-Mandiri Perdesaan (PNPM-MP). Program tersebut merupakan salah satu upaya Pemerintah yang bertujuan untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan yang berlanjut melalui peningkatan kesejahteraan masyarakat pedesaan dengan Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) memperkuat insitusi lokal, serta mendorong terlaksananya *Good Governance* (Depdagri RI TK PPK:2006).

Selain itu, PNPM-MP merupakan koreksi terhadap sistem pembangunan terdahulu yang bersifat sentralistik. Dengan adanya PNPM-MP tersebut sistem pembangunan yang bersifat sentralistik akan berubah menjadi demokratis. Pada masa sistem yang bersifat sentralistik pada pengambilan keputusan bersifat *top down*, dalam artian keputusan diambil dari atas ke bawah. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan tidak maksimal. Namun dengan PNPM-MP pola tersebut diubah menjadi *bottom up*, yaitu pola pengambilan keputusan dari bawah yang melibatkan masyarakat secara langsung dengan tahap pemberdayaan partisipatif.

Tujuan PNPM-MP selaras dengan pelaksanaan desentralisasi yang sedang berjalan dalam hal peningkatan sistem pengelolaan kepentingan publik ditingkat lokal. Selain itu, tujuan PNPM-MP dapat dicapai dengan meningkatkan kapasitas dan kelembagaan masyarakat dalam menyelenggarakan pembangunan desa, pengadaan sarana dan prasarana dasar pedesaan yang bermanfaat dengan masyarakat miskin, kegiatan-kegiatan sosial, pengembangan sumber ekonomi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

PNPM-MP di Sumatera Barat telah dimulai sejak tahun 2008, merupakan lanjutan dari Program Pengembangan Kecamatan (PPK) yang selama ini dinilai berhasil pelaksanaannya (Tim Koordinasi, 2008).

PNPM-MP di Sumatera Barat dilaksanakan pada 12 Kabupaten (Lampiran I). Di Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan PNPM-MP juga dilaksanakan pada tahun

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilaksanakan, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Profil pelaksanaan kegiatan SPP di kelompok SPP Harapan Bersama di Nagari Talang Koto Pulai Tapan dalam hal, identifikasi calon anggota, proses pencairan dana, proses penyaluran dana sudah dilaksanakan kelompok SPP Harapan Bersama sesuai dengan mekanisme dan Juknis PNPM-MP berjalan lancar dan baik sedangkan kegiatan sosialisasi dilapangan tidak berjalan sesuai dengan Juknis yang ada karena proses kegiatan sosialisasi dilapangan hanya dilakukan oleh tim teknis dan UPK Kecamatan tanpa adanya pendampingan dari Kabupaten.
2. Dalam pemanfaatan dan pengembalian dana bantuan PNPM-MP oleh anggota kelompok SPP Harapan Bersama terkait dalam penggunaan dana, jumlah dana yang dipinjam sesuai dengan proposal yang diajukan, jangka waktu pinjaman selama satu tahun, pengawasan berjalan dengan baik, cara pengembalian, waktu pengembalian, bunga pinjaman, dan jumlah pengembalian dana sesuai dengan Juknis PNPM-MP dan prosedur yang ada.
3. Peran PNPM-MP pada kelompok SPP Harapan Bersama dalam ekonomi rumah tangga adalah program PNPM-MP mampu mengerakkan ekonomi rumah tangga anggota kelompok SPP Harapan Bersama. Ini dibuktikan dengan termotivasinya anggota kelompok, meningkatkan penghasilan anggota kelompok dan membuka lapangan kerja.

## DAFTAR PUSTAKA

- A.Gany, Radi. 2001. *Demokratisasi Masyarakat Desa : Dinamika politik Dan Kelembagaan Politik Desa*. Makasar. <http://kajianhi.blogspot.com>. [2 Oktober 2006].
- Alfisyahrin. 2002. *Analisis Kegiatan Kelompok Masyarakat Dalam Mengelola Dana Bantuan Prama Pengembangan Kecamatan (PPK) Tahun Anggaran 1998/1999*. [Skripsi]. Universitas Andalas. Padang.
- Astrid, Susanto. 1984. *Sosialisasi Pembangunan*. Bina Cipta Bandung.
- Bappenas. 1993. *Panduan Desa Tertinggal*. Badan Pembangunan Nasional. Jakarta.
- Bappenas. 2004. *Persiapan Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan P2KP*. Padang.
- Beratha, Nyoman. 1982. *Masyarakat Desa dan Pembangunan Desa*. Gralia Indonesia. Jakarta.
- BPS dan BKKBN. 2006. *Data dan Informasi Kemiskinan*. Badan Pusat Statistik Sumatera Barat.
- BPS, 2008. *Jumlah Penduduk Kabupaten Pesisir Selatan*. Badan Pusat Statistik Kabupaten Pesisir Selatan.
- Depertemen Dalam Negeri. 2006. *Penjelasan Tentang PNPM.PPK*. Jakarta.
- Faisal, Kasyrino. 1984. (Penyunting) *Prospek Pengembangan Ekonomi Perdesaan Indonesia*. Yayasan Obor Indonesia. Jakarta.
- Hasibuan, Melayu. 2005. *Dasar-Dasar Perbankan*. Bumi aksara. Jakarta.
- Khairul. 2006. *Efektifitas Program Pemberdayaan Dalam Upaya pengentasan Kemiskinan Di Kabupaten Padang Periaman*. [Tesis]. Unand. Padang.
- Khrisnamurthi, B. 2004. "Strategi Pengembangan Pembiayaan Untuk Pengurangan Kemiskinan Dipertanian" Dalam Buku Rekkronstruksi Dan Restrukturisasi Ekonomi Pertanian, Beberapa Pandangan Kritis Menyongsong Masa Depan. Perhimpunan ekonomi pertanian indonesia. Jakarta.
- L. Jhingan, M 1999. *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*. PT. Raja. Grafindo Persada. Jakarta.
- Mubyanto. 1996. *Ekonomi Rakyat dan Program IDT*. Aditya Media. Yogjakarta.